

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (Keputusan Menteri No.35:2003). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Salah satu komponen dalam system transportasi adalah terminal. Fungsi utama dan terminal adalah untuk penyediaan fasilitas masuk dan keluar dan obyek-obyek yang akan diangkut, penumpang atau barang, menuju dan sistem. Terminal biasanya mudah terlihat dan merupakan prasarana yang umumnya memerlukan biaya yang besar dan titik dimana kemacetan mungkin terjadi. Pelabuhan udara, pelabuhan laut dan stasiun KA merupakan contoh terminal. Tetapi fungsi yang sama juga pada pemberhentian bus local pada persimpangan jalan yang merupakan tempat para penumpang berdiri waktu menunggu bus. Fungsi terminal saat ini dapat ditemui pada hampir setiap lokasi jalan dimana kendaraan dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.

Pada hakekatnya tujuan perencanaan pembangunan suatu negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Penyertaan masyarakat sebagai subjek perencanaan pembangunan adalah

suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan perencanaan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Menurut Duadji (2014: 46), Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif dapat member hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi disusun berawal dari pemikiran strategis dari nilai-nilai luhur yang dianut/dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 060. 255. K Tahun 2002 tentang Tugas dan Tata kerja Dinas Perhubungan serta Organisasi. Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan bertugas membantu

Gubernur dalam melaksanakan tugas otonom, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Mempunyai Visi “Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang di dukung tata pemerintahan yang baik”. 1. Handal meliputi : Aman, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau semua pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan dalam wadah Negara Republik Indonesia (NKRI), 2. Berdaya saing meliputi : Efisien, harga terjangkau, ramah lingkungan, berkelanjutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, mandiri produktif, 3. Memberikan nilai tambah meliputi : Tumbuhnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat dan pengusaha kecil, menengah, koperasi, memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempunyai Misi “Membangun dan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agroindustri, pariwisata dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan cara :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan (rekondisi / survival), 2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dan menegakkan hukum secara konsisten (restrukturisasi dan reposisi), 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan. 4.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberi nilai tambah.

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang baik di bidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan Ilmu dan Teknologi yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian / Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional. Selanjutnya dengan mengacu pada RPJP Nasional, Pemerintah Daerah menyusun RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah, serta menyusun RPJM (Renstra) daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kota Pematang Siantar sebagai salah satu kota di Propinsi Sumatera Utara yang memiliki luas 79.91 Km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 43 kelurahan dengan jumlah penduduk 246.277 jiwa (kota Pematang Siantar dalam angka, BPSN Tahun 2007), sedang berbenah diri diberbagai sektor kehidupan guna mencapai visi Kota Pematang siantar yaitu “Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Yang Maju, Indah, Nyaman dan Beradap”. Artinya Kota Pematang Siantar diharapkan dimasa mendatang semakin memiliki peranan penting dalam perdagangan dan jasa.Untuk itu di perukan penataan dan rekontruksi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dari sudut pandang transport dimana arus distribusi orang, barang, dan jasa dari suatu lokasi ke lokasi lain, kemudian berhenti pada konsumen akhir, hanya dimungkinkan terjadi dengan baik bila didukung sarana dan prasarana transportasi yang baik.

Kota Pematang Siantar sebagai kota nomor dua terbesar setelah kota Medan yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam bidang infrastruktur perlu melakukan pembenahan dalam sektor pembangunan penataan kota guna mencapai visi menjadi kota perdagangan dan jasa. Salah satunya dengan melakukan pembenahan sarana tranportasi guna kelancaran aktivitas perdagangan. Pemerintah kota Pematang Siantar membentuk kebijakan untuk melakuakn relokasi terminal yang baru karena pemerintah menganggap terminal Parluasan yang di anggap tidak memenuhi standar sebagai terminal penumpang tipe A. Bila kita melihat tata letak terminal Parluasan yang yang ada sekarang ini, sudah tidak layak untuk di gunakan karena terminal tidak mampu menampung

banyaknya armada transportasi umum yang singgah untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dan masalah selanjutnya terminal Parluasan terletak pada inti kota menjadi salah satu penyebab kesemrautan transportasi di inti kota karena terjadi penumpukan bus-bus yang mengakhiri perjalanan. Ditambah lagi dengan masuknya bus-bus antar provinsi yang mempersempit ruas jalan dan ditambah lagi banyaknya kendaraan pribadi yang sudah memenuhi jalan protokol. Dengan kesemrautan transportasi yang terjadi di kota Pematang siantar ini menjadikan masyarakat merasa tidak nyaman dan mengganggu keindahan kota dengan kemacetan yang terjadi pada inti kota. Pertumbuhan armada transportasi yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan dan di tambah lagi dengan terminal yang sudah tidak memenuhi standar oprasional menjadi masalah utama yang harus dibenahi pemerintah kota Pematangsiantar.

Dengan demikian bertolak dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Terminal Parluasan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Suka Dame Kota Pematangsiantar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah ada pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Pematangsiantar Kecamatan Siantar Utara ?

2. Apakah ada pengaruh Perencanaan Pembangunan Terminal Perluasan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Pematangsiantar Kecamatan Siantar Utara ?
3. Apakah ada pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengaruh Perencanaan Pembangunan Terminal Perluasan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Pematangsiantar Kecamatan Siantar Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengaruh partisipasi masyarakat di Pematangsiantar Kecamatan Siantar Utara
2. Bagaimana pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Terminal Perluasan di Pematangsiantar Kecamatan Siantar Utara
3. Bagaimana pelaksanaan pengaruh partisipasi masyarakat , perencanaan pembangunan terminal perluasan dan kesejahteraan masyarakat Pematangsiantar Kecamatan Siantar Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan observasi tanpa kontrol. Penelitian memegang peranan yang amat penting dalam memberikan fondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek pembangunan. Jika penelitian tidak diadakan, serta kenyataan-kenyataan tidak pernah diuji lebih dahulu melalui penelitian. Tidak ada negara yang sudah maju dan berhasil dalam

pembangunan, tanpa melibatkan banyak daya dan dana dalam bidang penelitian.

Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kontribusi dari penelitian mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut. Ada dua cara untuk menilai benefit (keuntungan) dari penelitian. Pertama, menggunakan teknik internal rate of return to investment. Dan kedua dengan menghitung nilai marginal dari output per dolar modal yang ditanamkan dalam penelitian.

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik Universitas HKBP Nommensen dapat memperbanyak bahan referensi penelitian di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Terkhusus bagi program studi administrasi publik dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis berguna sebagai sarana untuk melatih dan membangun kemampuan berpikir ilmu dalam menganalisis masalah dilapangan kerja. Peneliti ini diharapkan memberikan masukan kepada dinas perhubungan Pematangsiantar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya.

Pengertian partisipasi/peran-serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikut-sertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil kegiatan yang dicapai (Mardikanto dan Soebiato, 2012).

Kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Partisipasi Spontan

Peran-serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik, berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.

2. Partisipasi Terinduksi

Peran-serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik, berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.

3. Partisipasi Tertekan oleh Kebiasaan

Peran-serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan seperti yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Atau peran-serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat. Jika tidak berperan-serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

4. Partisipasi Tertekan oleh Alasan Sosial-Ekonomi

Peran-serta yang dilakukan masyarakat, karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian dengan tidak memperoleh bagian dari manfaat hasil kegiatan pembangunan.

5. Partisipasi Tertekan oleh Peraturan

Peran-serta yang dilakukan masyarakat, karena takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan yang diberlakukan.

2.1.2 Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat

Menurut Department for International Development (DFID) dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif (Sumampouw, 2004), prinsip-prinsip partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Cakupan, Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

2. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership), Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi, Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership), Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan tanggung jawab (Sharing Responsibility), Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (Sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (Empowerment), Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama, Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai

kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.1.3 Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Dwiningrum (2011), partisipasi dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi, Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

2.1.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Keith Davis dalam Intan dan Mussadun (2013 : 34) mengemukakan bahwa bentuk bentuk dari partisipasi masyarakat antara lain :

a. Pikiran

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

b. Tenaga

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki baik secara kelompok maupun individu agar tercapai yang diinginkan.

c. Pikiran dan Tenaga

Merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.

d. Keahlian

Merupakan jenis partisipasi dimana keahlian merupakan unsur yang paling diinginkan untuk menentukan keinginan.

e. Barang

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.

f. Uang

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.

2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2010), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Kesiediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
3. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpolat dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.

6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (resource) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

2.1.6 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan

karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Secara umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dikarenakan masyarakat hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan input, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat yang akan diperoleh dan dirasakan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Selain itu, masyarakat tidak atau kurang informasi yang jelas tentang kesempatan yang disediakan untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Dengan demikian, pemberian kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, harus dilandasi pemahaman bahwa masyarakat layak diberi kesempatan, karena memiliki kemampuan yang diperlukan, dan masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun guna perbaikan mutu/kualitas kehidupannya.

2.1.7 Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, menurut Marschall (2006) indikator tersebut antara lain yaitu :

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.

Tersedianya forum atau media untuk menampung partisipasi masyarakat. Forum atau media ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya serta akan meningkatkan partisipasi tersebut.

2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses. Masyarakat mampu dalam terlibat saat proses terjadinya partisipasi.

Ini juga berarti masyarakat harus memiliki kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi.

3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan pendapatnya saat proses pengambilan keputusan. Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area governance yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik.

Adapun menurut Sedarmayanti (2009 : 16-22) menyebutkan bahwa indikator partisipasi antara lain :

1. Adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses atau metode partisipatif.

Salah satu indikator partisipatif yaitu tersedianya pemahaman penyelenggaraan negara mengenai proses ataupun metode apa saja yang ada pada partisipatif.

2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pengambilan keputusan harus didasarkan atas konsensus bersama yakni adanya kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.

Indikator partisipatif salah satunya dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan yang bertujuan untuk pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Masyarakat dapat dikatakan partisipatif jika terdapatnya perubahan pada sikap masyarakat dimana masyarakat akan lebih peduli terhadap setiap langkah mapn keputusan yang dilakukan pemerintah daerah.

2.2 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraa pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh beberapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa.

Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat top down atau bottom up planning, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuantujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih,2014:92).

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

2.2.1 Pengertian Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe,2005:27)

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Defenisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian

dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber.
(Uno,2006 :1)

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan , rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan kadang-kadang menjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu pencapaian harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin (Handoko 2012:78)

Jadi, perencanaan adalah sebuah patokan atau acuan serta pedoman yang dilakukan agar mempermudah organisasi/instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta mempermudah dalam mengarahkannya ketujuan yang diharapkan dengan sumber daya yang tersedia.

2.2.2 Pengertian Pembangunan.

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Sudjana (2001:265) Pembangunan adalah proses dinamisasi, demokratisasi, dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksud bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan edukatif untuk membangkitkan praserta masyarakat. Program-Program pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi. Menurut Siagian (2005 : 4), mengatakan bahwa pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

2.2.3 Fungsi Perencanaan.

Dalam kamus bahasa Indonesia kata fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto (dalam Nining Haslinda 2008:22) Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya.

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagian (2002:36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang.

Menurut Handoko, (2003: 23) ada dua fungsi perencanaan :

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan
2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Untuk merumuskan sebuah perencanaan pembangunan harus ditentukan langkah-langkah tertentu guna penetapan perencanaan yang baik (Prajudi dalam Syafie, 2007; 50), yaitu :

1. Identifikasi masalah

2. Analisis situasi
3. Merumuskan yang hendak dicapai
4. Menyusun garis besar semacam proposal
5. Membicarakan proposal yang telah disusun
6. Menetapkan komponen
7. Penentuan tanggungjawab masing-masing komponen
8. Menentukan outline
9. Mengadakan kontak antar unit
10. Pengumpulan data terkait
11. Pengolahan data
12. Penyimpulan data
13. Pendiskusian rencana sesuai data
14. Penyusunan naskah pinal
15. Evaluasi naskah rencana
16. Persetujuan naskah rencana
17. Penjabaran untuk pelaksana.

Jadi dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Menurut Siagian (2003: 90-91) proses perencanaan dapat ditinjau dari cirri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
7. Rencana harus luas.
8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
9. Rencana harus bersifat praktis.

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam sebuah perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan, dimana terdapat tiga hal penting dalam penggunaan waktu :

1. Waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif,
2. Waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variable dan alternative, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua kemungkinan,

3. Jumlah waktu yang akan dicakupkan dalam rencana harus dipertimbangkan.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (UU NO. 25 Tahun 2004, pasal 1).

2.2.4 Faktor Penghambat dalam Perencanaan

Menurut Riyadi dan Deddy (2005 : 349) Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Keadan politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan.
2. Kondisi Sosial Ekonomi, biasanya mencerminkan kemampuan financial daerah. karena kemampuan financial memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik.
3. Budaya atau Kultur yang dianut oleh masyarakat. Apabila kultur ini tidak diberdayakan dan diarahkan kearah yang positif secara optimal

akan sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap implementasinya.

Menurut Todaro, (2000:67) dalam perumusan perencanaan pembangunan bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh beberapa masalah khusus tertentu, yaitu :

1. Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
2. Data-data yang tidak memadai dan tidak handal.
3. Gojolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
4. Kelemahan kelembagaan.
5. Kurangnya kemauan politik.

2.2.5 Konsep Dasar Pembangunan Terminal

Sistem Transportasi perkotaan yang dapat berfungsi dengan baik merupakan salah satu factor dalam mewujudkan wilayah perkotaan yang efisien. Perkembangan perkotaan yang sangat pesat yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat pula tentu akan menyebabkan berbagai masalah dalam bidang transportasi yang harus segera diatasi dan juga dapat menimbulkan tuntutan untuk menambah kualitas dan kuantitas sistem sistem transportasi. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari sistem, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan mungkin terjadi.

Terminal merupakan titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum. Sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas. Sebagai prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang

dan barang. Sebagai unsur tata ruang untuk melancarkan arus penumpang dan barang. Sebagai unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

Menurut keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 1995, maka terminal dapat diuraikan sebagai berikut : 1.) Terminal penumpang tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota, antar provinsi (AKAP) dan antar lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. 2.) Terminal penumpang tipe B mempunyai fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) dan angkutan pedesaan (ADES). 3.) Terminal penumpang tipe C mempunyai fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan (ADES).

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah

tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron 2012). Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan

atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007).

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan social lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya.

2.3.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan social lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai barometer keberhasilan dapat dilihat dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI), yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil per kapita.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah Negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: 1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka

tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3) standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Menurut UNDP, hasil IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Berdasarkan IPM, maka suatu wilayah dapat dimasukkan ke dalam beberapa kategori/kelas pembangunan manusia (skala internasional). Daerah dengan nilai IPM kurang dari 50 termasuk kelas pembangunan manusianya rendah. Daerah dengan nilai IPM 50-65,99 termasuk kelas pembangunan manusia menengah ke bawah. Daerah dengan nilai IPM 66-80 termasuk kelas pembangunan manusia menengah ke atas. Daerah dengan nilai IPM di atas 80 termasuk kelas pembangunan manusia tinggi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pendukung atau panduan bagi sebuah penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kasmira, 2020.	STRATEGI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALANDI KABUPATEN GOWA.	Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil ataupun target yang diharapkan/dihendaki dengan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan. Pembangunan infrastruktur jalan dalam hal ini sudah efektif namun masih banyak biaya ataupun anggaran yang tertunda.

2	Sulva 2014	ANALISIS RENCANA STRATEGIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DI KECAMATAN MEUREUBO.	Analisis Rencana Strategis Terhadap pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat di Kecamatan Meureubo yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa Analisis Rencana Strategis Terhadap pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat di Kecamatan Meureubo telah cukup baik. Hal ini dapat terjadi oleh adanya para ahli yang ada di Kecamatan tersebut dalam pembentukan rencana strategis dalam pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3	WULAN ROOFIAH, 2011	PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURAKARTA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENYEDIAAN AIR BERSIH.	Strategi merupakan pola tujuan kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi tersebut, apa yang dikerjakannya, dan mengapa organisasi mengerjakan hal tersebut. Jadi, merumuskan strategi adalah merumuskan program-program strategis atau alternatif kebijakan mendasar yang akan dilakukan organisasi untuk mengelola isu. Pada tahap ini dirumuskan program-program strategis yang akan dilakukan organisasi untuk menanggapi dan menyikapi isu strategis yang berada pada tahap sebelumnya.
4	Nur Aida, 2020	PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA LACCORI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE.	Hasil yang diperoleh mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Laccori yaitu bahwasanya pembangunan infrastruktur di Desa Laccori

			<p>masih sangat tertinggal dan bisa dikatakan belum optimal, dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur jalan yang dianggap meresahkan masyarakat padahal anggaran desa harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian ini juga dapat dilihat dari persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Laccori membuat masyarakat kecewa. Harapan dari masyarakat Desa Laccori tentang pembangunan infrastruktur jalan jauh dari kenyataan. Masyarakat Desa laccori menganggap bahwa anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan belum dapat dinikmati hasilnya.</p>
5	Raveno Hikmah Indah Nur Rohman, 2019	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PASAR KUNA LERENG DESA PETIR KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS.	Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal dapat diwujudkan melalui Pasar Kuna Lereng sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya
6	Prengki Joy Andreas 2019	ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DURIN TONGGAL, KECAMATAN PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG	Pembangunan tidak terlepas dengan masyarakat karena selalu melandaskan partisipasi masyarakat. Pembangunan desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, oleh sebab itu partisipasi aktif dari masyarakat yang merupakan suatu kunci keberhasilan pembangunan desa dan dibantu dengan kebijakan pemerintah.

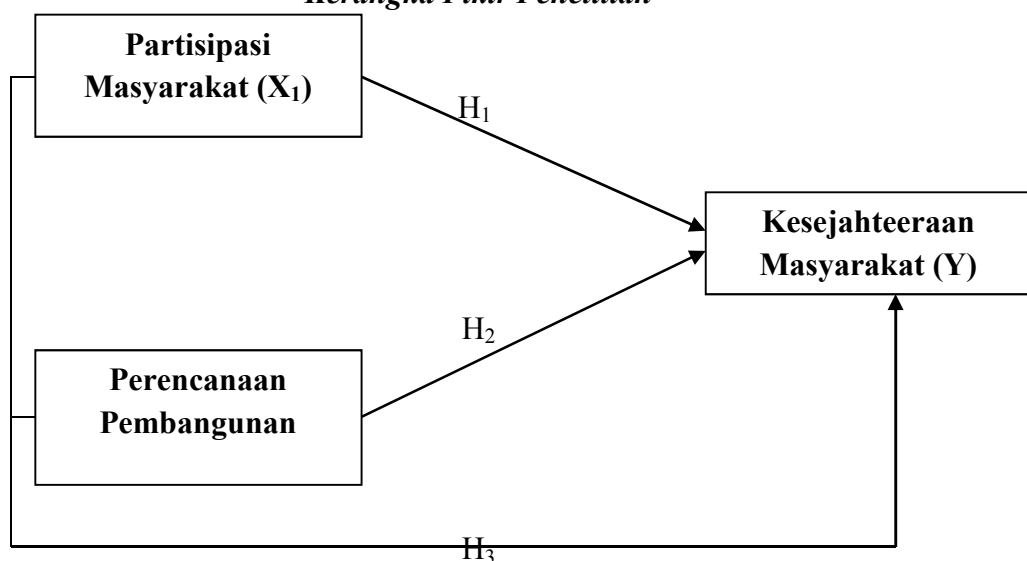
Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di tulis sekarang yaitu dimana penelitian terdahulu tidak jauh bedanya dengan penelitian

sekarang karena sama sama meneliti bagaimana perencanaan strategis, pembangunan dan partisipasi masyarakat, bedanya hanya saja peneliti melakukan penelitiannya sekaligus untuk melakukan penulisan terhadap terminal perluasan di kecamatan siantar utara kota pematangsiantar.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Komponen utama pada kerangka pemikiran yang dikembangkan Gregor Polancik (Polancik, 2009) adalah Independent Variables (variabel bebas), Dependent Variables (variabel terikat), Levels (indikator dari variabel bebas yang akan diobservasi), Measures (indikator dari variabel terikat yang akan diobservasi). Kerangka pemikiran di bawah menggambarkan alur logika penelitian dan hubungan antar konsep yang ingin diteliti. Penelitian ini adalah tentang perencanaan Straregis pembangunan dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat, Untuk memudahkan memahami penelitian, dikemukakan kerangka penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



2.6 Hipotesis Penelitian

Menurut Suryabrata (2012:20) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah;

1. Ada pengaruh Partisipasi Masyarakat secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Pematangsiantar Kec. Siantar Utara.
2. Ada pengaruh Perencanaan Pembangunan Terminal Perluasan secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Pematangsiantar Kec. Siantar Utara.
3. Ada pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Terminal Perluasan terhadap kesejahteraan masyarakat Pematangsiantar Kec. Siantar Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian explanatory research yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan jenis penelitian tingkat penjelasan, maka tipe penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis. Pada penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1), dan Perencanaan Pembangunan Terminal Parluasan (X2), Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pematangsiantar Kec. Siantar Utara (Y).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana dilaksanakannya penelitian dan untuk memperoleh data. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Terminal Parluasan kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Yang dimaksudkan dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam populasi penelitian digolongkan tidak terhingga, dikarenakan adapun pengguna dari sisi penjual/pedagang kebutuhan terminal, ada

dari sisi pengemudi angkutan umum, ada dari sisi Pengemudi bus penumpang antar luar kota sehingga bisa digolongkan jumlah populasi tidak terhingga. Oleh Karena itu peneliti mengambil kebijakan menentukan jumlah sampel sebagai sumber informasi dalam penelitian ini sebanyak 100 orang sebagai pengguna terminal (Insidentil).

3.3.2. Sampel

Yang dimaksudkan dengan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya. Dengan kata lain, sampel merupakan bagian dari populasi. Pengambilan sebagian itu dimaksudkan sebagai representasi dari seluruh populasi sehingga kesimpulan juga berlaku bagi keseluruhan populasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menentukan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang tidak didasarkan atas strata atau pedoman, tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Maka banyaknya sampel sebagai subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kebutuhan secara insidentil sebanyak 100 orang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrument:

- a. Kuesioner, yaitu: teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan alternative jawaban yang tersedia dalam bentuk angket kepada responden.
- b. Observasi, yaitu: kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian.

2. Teknik Pengumpulaln Data Sekunder

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dan bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang dimiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumenter, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi terkait.

3.5. Defenisi Operasional Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing –masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik,

secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat.

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan dan menganalisis suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat maka terlebih dahulu melakukan pengolahan data sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul.

3.6.1. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Untuk menghitung validitas kuesioner menggunakan “Rumus Korelasi Produk Moment”

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana :

r_{xy} : Koefisien Korelasi
 x : Variabel Bebas
 y : Variabel Terikat
 n : Jumlah sampel/responden

Perhitungan ini menggunakan bantuan komputer program statistik (SPSS). Bila nilai r hitung validitas instrumen 0,3 lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 95% dan α 5% maka hasilnya valid. Tetapi apabila r hitung validitas instrumen 0,3 lebih kecil dari r tabel maka hasilnya tidak valid.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Koefisien *Cronbach Alpha* yang $> 0,60$ menunjukkan kehandalan (reliabilitas) instrumen. Jika koefisien *Cronbach Alpha* yang $< 0,60$ menunjukkan kurang handalnya instrumen. Selain itu, *Cronbach Alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X_1), Perencanaan Pembangunan Terminal Parluasan (X_2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) adalah metode regresi linier berganda dengan persamaan umum:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

dimana,

Y = Kesejahteraan Masyarakat
 X_1 = Partisipasi Masyarakat

X_2	=	Perencanaan Pembangunan
a	=	Konstanta
b	=	Koefisien regresi

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap dependen yang lain konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} . Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan pada $\alpha = 5\%$

1. $-t_{table} \alpha/2 \leq t_{hitung} \leq t_{tabel} \alpha/2$ berarti H_0 ditolak dan menerima H_1
2. $t_{hitung} > t_{table} \alpha/2$ atau $t_{hitung} < -t_{table} \alpha/2$ berarti H_0 diterima dan menolak H_1

3.6.4.2 Uji Simultan (Uji-F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_1 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan pada $\alpha = 5\%$

1. $-F_{table} \alpha/2 \leq F_{hitung} \leq F_{tabel} \alpha/2$ berarti H_0 ditolak dan menerima H_1
2. $F_{hitung} > F_{table} \alpha/2$ atau $F_{hitung} < -F_{table} \alpha/2$ berarti H_0 diterima dan menolak H_1

